

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Klaten memiliki potensi yang besar pada alam dan kebudayaanya jika dikelola dengan maksimal akan mengoptimalkan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan otonomi daerah dimana pemerintah memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur kegiatan pemerintahan daerah serta kepentingan masyarakat daerahnya masing-masing dengan peraturan daerah yang berlaku yang dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Menurut Pamartha dan Budiasih (2016) tujuan dari otonomi adalah meningkatkan pelayanan pelayanan, kesejahteraan sosial, pemerataan, serta pemeliharaan kinerja yang sesuai antar pemerintah pusat dengan daerah antardaerah, selain itu dalam menunjang pelaksanaan wewenang pemerintah daerah, pemerintah pusat juga memberikan transfer tidak bersyarat. Transfer tidak bersyarat meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak dan hasil sumber daya alam. Disamping itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan atas sumber

pendanaan lain seperti Pendapatan Asli Daerah, pembiayaan dan lain-lain pendapatan kepada pemerintah daerah.

Pada kenyataannya setiap kabupaten di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah yang berbeda. Kabupaten yang mempunyai pendapatan yang tinggi maka kabupaten tersebut akan lebih maju dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang lebih rendah maka, kabupaten tersebut akan cenderung mengharapkan transfer dana tidak bersyarat yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Kondisi pemerintah daerah yang selalu bertumpu pada transfer tidak bersyarat dari pemerintah pusat ini lah yang dikenal dengan istilah *Flypaper effect*. *Flypaper effect* adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah menggunakan belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer *unconditional grants* atau transfer tidak bersyarat daripada pendapatan asli daerahnya yang akan mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran belanja daerah (Friyani, 2017). Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam dimana pada Qs. Al Isra' ayat 26 yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan dan jangan lah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Qs. Al Isra’:26).

Walaupun dana transfer tidak bersyarat digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik tetapi mengakibatkan kurang termotivasinya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Disamping itu, tekanan fiskal basis pajak lokal menurun yang akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak berkurang sedangkan kebutuhan publik semakin meningkat.

Flypaper Effect menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut mandiri atau tidak, sehingga *flypaper effect* juga dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah tersebut. Pada penelitian sebelumnya *Flypaper Effect* diketahui dengan melihat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan oleh karena itu peneliti akan menambahkan cara untuk menganalisis *Flypaper Effect* dengan melihat kinerja keuangan daerah tersebut bukan dengan melihat pengaruhnya.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi pendapatan asli daerah
2016	224.197.408.481,19
2017	371.718.439.306,04
2018	395.884.244.135,42

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan kabupaten klaten

Alasan peneliti memilih kabupaten klaten dikarenakan klaten terletak pada dua kebudayaan yang berbeda yaitu antara kebudayaan yogyakarta dan kebudayaan surakarta sehingga klaten memiliki potensi yang besar pada alam serta dalam kebudayaan yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan

disamping itu, Tabel 1.1 diatas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan.

Kinerja adalah hasil pencapaian dari sebuah rencana baik dari individu maupun organisasi/perusahaan (Lubis, 2017), oleh karena itu diperlukan pengukuran kinerja agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta tolok ukur dalam melihat perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, derajat kontribusi BUMD, derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis *Flypaper Effect* Pada Kabupaten Klaten Berdasarkan Kinerja Keuangan Tahun 2016-2018”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dikaji adalah “Bagaimana fenomena *Flypaper Effect* pada kabupaten Klaten berdasarkan kinerja keuangan tahun 2016-2018?”

C. Batasan Masalah

Untuk mengetahui bahwa suatu daerah mengalami *Flypaper Effect* atau tidak dapat menggunakan banyak cara dalam penelitian ini memiliki keterbatasan masalah yaitu menganalisis *Flypaper Effect* dengan melihat kinerja keuangannya tahun 2016-2018 serta dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan rasio keuangan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Klaten
2. Untuk mengetahui fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten Klaten

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan pada bidang akuntansi dalam menggunakan analisis deskriptif dan rasio keuangan dalam menganalisis *Flypaper effect* pada suatu daerah.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai *Flypaper Effect* sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya.

